

# TINJAUAN SOSIAL-POLITIK TERHADAP ISLAM DAN TAMADUN MELAYU DI ASIA TENGGARA TANTANGAN DAN HARAPAN

Oleh: Muhammad Halkis

Doktor FIB Universitas Indonesia & penulis Revitalisasi Hak Ulayat

Email : *m\_halkis@yahoo.com*

## Abstrak

*Hubungan Islam dengan masyarakat Melayu muncul dalam membangun peradaban terasa nyata ketika era pasca kolonial memerlukan pemikiran kebangsaan (nation state) terbentuk melalui proses politik kenegaraan sehingga kadar resapan negara-negara terhadap nilai-nilai Islam dapat dipahami. Teori yang menjelaskan bahwa negara bangsa adalah produk modernitas tidak sejalan dengan masyarakat kultur yang berorientasi pada masa lalu adalah keliru, karena masa sekarang merupakan dunia kehidupan yang berlanjut dalam situasi yang berbeda.*

*Ada tiga indikator resapan sebuah negara dalam era globalisasi saat ini terhadap Islam, yaitu; 1) konstitusi, mengatur kehidupan administrasi sebuah negara, 2) politisasi sejauh mana Islam menjadi bahasan konsumsi politik kenegaraan, dan 3) simbolisasi menggunakan simbol-simbol ke-Islam dalam menunjukkan identitas kenegaraan.*

**Kata Kunci:** *Islam, Tamadun Melayu*

## Tamadun Melayu dari kultural ke struktural.

“Tak Melayu hilang di bumi, bumi bertuah negeri beradat”, demikian sumpah Hang Tuah dalam kitab *Sulalatus Salatin*<sup>1</sup>. Melayu bagi Hang Tuah bukan hanya sebuah bangsa etnik *Austro-Asiatic* yang terdiri dari ratusan suku hidup di

semenanjung Melayu dan perairan nusantara, namun Melayu adalah kesadaran subjektivitas dalam ruang dan waktu. Melayu membangun tekad untuk maju dan beridentitas diri dalam peradaban yang Islamiah. Menurut UU Hamidi “Melayu identik dengan Islam, tidak Melayu kalau tidak Islam”.<sup>2</sup>

Tujuan kajian ini untuk menjelaskan hubungan Islam dengan masyarakat Melayu dalam dalam pembentukan Tamadun

---

<sup>1</sup>Kitab *Sulalatus Salatin* (Keturunan Raja-raja) salah satu kitab penting memahami sejarah, budaya dan kerajaan di Melayu. Versi yang cukup populer suntingan Raffles (1821), Abdullah bin Abdulkadir Munsyi (1831), William Shellabear (1915), Aman Datuk Madjoindo (1959).

---

<sup>2</sup>UU Hamidi Pembimbing Skripsi pemakalah di IAIN/UIIN Sultan Syaraif Kasim Pekanbaru, 1992.

Melayu di Asia Tenggara. Landasan teori kajian ini dapat dilihat dari persoalan ideologi dan tauhid/theologi. Menurut beberapa ilmuawan kalau ideologi kultur dipadukan dengan theologi tidak relevan dan berbahaya, pendapat tersebut tentu berdasarkan pengalaman masa lalu agama tertentu.<sup>3</sup> Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memiliki sistem nilai, norma, tatanan sosial yang mengatur perilaku bagi penganutnya namun masyarakat di Asia Tenggara memiliki lingkungan fisik alami yang dinamis sehingga persoalannya bagaimana masyarakat Melayu membangun eksistensi diri dalam menghadapi tantangan dan sekaligus peluang untuk hidup tumbuh, berkembang dan berjaya dalam melewati zamankhususnya dalam kawasan ATM (Asia Tenggara Maritim).<sup>4</sup>

Slavoj Žižek dalam bukunya *“The Sublime Object of Ideology”* menjelaskan bawah ideologi tidak ada yang beku, tapi sublim (menguap) dengan sendirinya sejalan dengan perubahan waktu. Demikian juga halnya dengan Melayu kalau kita lihat sebagai ideologi yang tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Nyata-nyatakannya kita sekarang yang dikatakan bersatu dalam satu

rumpun, satu bahasa namun kita terpisah, masing-masing memiliki negara, memiliki otoritas sendiri-sendiri yang diakui oleh satu dengan yang lainnya. Subjek bersifat kosong, retak, pecah dan tersebar, membangun jarak satu dengan yang lain. Hubungan satu dengan yang lain membangun suatu konstelasi, untuk itu paling mungkin kita melihat konstelasi dunia kehidupan (*lebenswelt*) masyarakat Melayu dalam perspektif Islam. Dari aspek ideologi, Melayu ada atau tidak terletak dari kreativitas kaum intelektual dan masyarakat Melayu itu sendiri.

Edmund Husserl memilah subjektivitas dunia kehidupan (*lebenswelt*) dengan dunia alamiah (*umwelt*). Kalau *lebenswelt* diperuntukan pada kesadaran manusia dalam ruang dan waktu, sementara *umwelt* melihat kehidupan manusia dalam lingkungan kehidupan alamiah sebagaimana halnya makhluk hidup lainnya (zoology). Persoalannya tentu Islam sebagai pembentuk kesadaran subjek atau hanya sekedar simbolisasi yang diperalat oleh kelompok elit, kaum feodal, atau para bangsawan. Kalau disebut Islam pembentuk kesadaran, maka pertanyaan selanjutnya kesadaran seperti apa yang dibentuk oleh Islam tersebut. Namun kalau Islam digunakan sebagai simbol, maka pertanyaan siapa yang menggunakan simbol tersebut dengan cara bagaimana dan dalam rangka tujuan apa sehingga esensi Islam apakah tetap melekat atau tidak dengan budaya masyarakat Melayu tersebut.

---

<sup>3</sup> Villa, Charles -Vicencio, *A Theology of Reconstruction Nation-Building And Human Rights*, Cambridge University Press 1992, p.1

<sup>4</sup> Negara-negara yang termasuk ATM adalah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor Leste. Negara-negara yang termasuk ke dalam ATD (Asia Tenggara Daratan) adalah; Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Hubungan Islam dengan masyarakat Melayu menurut Profesor Zainal Kling tidak dapat dilihat seperti hubungan antara aur dengan tebing, tapi masyarakat tumbuh bagaikan enau dalam semak belukar, masing-masing enau berhasrat muncul menunjukkan pucuk-pucuknya. Tamadun Melayu merupakan perpaduan dari berbagai pengaruh kebudayaan seperti budaya lokal/tradisional, Islam, Hindu, Budha, Barat dan lain lain dalam membangun “kebudayaan inti”. Islam hanya bagian dari kebudayaan yang mempengaruhi Tamadun Melayu.<sup>5</sup> Pandangan ini mirip dengan pandangan Michel Foucault tentang kekuasaan. Menurut Foucault kekuasaan tidak bisa dikuasai dan dimiliki tapi tersebar, berubah-ubah dan ada di mana-mana. Bedanya Prof Zainal melihat kebudayaan sesuatu yang tumbuh, sedangkan Foucault bersifat mobil, sehingga Foucault lebih lanjut menyarankan adanya institusi kontrol seperti panoptikon ala Bentham, sedangkan Melayu tidak memiliki kemampuan melakukan kontrol membentuk panoptikon tersebut sehingga dihadapan Foucault ideologi Melayu dalam keadaan terbagi. Persepsi ini memberikan penyegaran kepada kita bahwa masyarakat sesungguhnya hidup dan berinteraksi satu

dengan yang lain, masyarakat juga sebagai kelompok dan berpacu selalu untuk memperlihatkan eksistensi dirinya. Dengan demikian Masyarakat jika dilihat bagaikan tumbuhan enau tersebut memerlukan energi untuk tumbuh, namun berhadapan dengan lingkungan bisa jadi sebagai kawan dan lawan (subjek and kalianan/others).

Pandangan ini kalau kita rangkai dengan pendapat Sosiolog Universitas Singapore Lian Kwen Fee bahwa masyarakat Asia Tenggara telah mengalami tiga tahap proses sosial yaitu; kolonialisasi, dekolonialisasi dan moderinasi, sedangkan identitas Melayu telah berubah bukan hanya sebagai reaksi dari pandangan bersifat primordial tapi sudah menjadi konstruksi sosial dikarena keadaan terkait dengan perkembangan ekonomi dan politik sehingga dalam Melayu dapat dipahami dalam *nation state* di Malaysia, Singapore dan Indonesia dalam bentuk yang berbeda.<sup>6</sup> Kalau dicermati lebih dalam tampaknya pandangan Lian Kwen Fee ingin menunjukkan bahwa Singapore merupakan bagian masyarakat Melayu. Pandangan terhadap kebudayaan pascakolonial harus terkait dengan keberadaan negara, sehingga persoalan negara Asia Tenggara memposisikan Islam dalam menyikapi tantangan dan peluang perlu dicermati.

---

<sup>5</sup> Kling, Zainal (Profesor Antropologi dan Sosiologi Fakultas Sastra dan Sain Sosial), *Pelestarian dan Pengembangan Masyarakat dan Kebudayaan Melayu*, diambil dari Buku Alam Melayu, Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan (penyelenggara Elmustian Rahman, Tien Marni dan Zulkarnaen), UNRI Press, Pekanbaru, 2003, p.130

---

<sup>6</sup> Fee, Lian Kwen, *The Construction of Malay Identity across Nation Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Published by KITLV-Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Vo.157, No.4 (2001) pp.861-879

## **Kadar Resapan Negara Asia Tenggara terhadap Islam**

Kuatnya hubungan Islam dengan Melayu memang luar biasa. Tidak ada teori yang pasti untuk menjelaskan hubungan tersebut demikian melekat. Padahal kalau bicara kebudayaan Melayu seyogianya kita melihat asal usul Proto-Deutro Melayu telah datang 3000 dan 1500 SM dari Yunan, sementara Islam datang bersamaan kemajuan Daulah Abbasiyah (750-1258 M) hingga sampai pertama kali ke Samudera Pasai, Perlak-Aceh sebelum abad 13 M. Secara sederhana kesuksesan syiar tersebut karena dagang, perkawinan dan spiritual sufi oleh para keturunan Islam Gujarat. Untuk itu Melayu dan Islam sesungguhnya memiliki distansi. Kajian tentang distansi tersebut akan terlihat esensi Melayu dalam dunia kehidupan Masyarakat di Asia Tenggara.

Realitas sosial kolonialisasi Melayu berawal dari pembagian potensi selat Melaka melalui Perjanjian/Tractat London 1924 antara Kerajaan Inggeris dengan Kerajaan Belanda. Wilayah Asia Tenggara Maritim di sebelah utara oleh Inggeris dengan sistem hukum Anglo Saxon dan bagian selatan oleh Belanda dengan sistem hukum kontinental. Ketidak berdayaan Masyarakat Melayu tampak dalam peristiwa ini. Kemudian setelah perang dunia kedua dibagi dalam beberapa negara. Dalam perkebangannya keberadaan negara tidak bisa lepas serta merta dengan kolonialisasi, sampai hari ini. Kebudayaan Inggeris di Malaysia, Singapore dan Brunei, demikian juga

dengan Belanda di Indonesia menjadi rujukan dalam pembangunan hukum dan politik di negeri ini. Sekalipun kedekatan Islam dengan masyarakat tidak dapat dipungkiri tapi negara sebagai sebuah subjek memiliki alur tersendiri dalam memperlihatkan eksistensinya. Untuk itu pertanyaan sekarang sumbangana Islam berikan kepada dunia kehidupan dalam suatu negara di era global saat ini.

Untuk itu pemakalah mengajukan klasifikasi masyarakat Melayu terkait dengan negara di Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan era global saat ini. Kalau merujuk pendapat Sennett Richard dalam bukunya *The Culture of the New Capitalisme*<sup>7</sup> ciri-ciri masyarakat era global dapat disebutkan; birokratisasi, politisasi, dan nihilis. Dalam tulisan ini pemakalah menyederhanakan dengan; konstitusi, politisasi dan simbolisasi.

### **1. Konstitusi**

Kondisi masyarakat global penuh dengan paradoks, namun mereka memiliki tatanan tersendiri. Persoalan yang menonjol diantaranya masalah penataan pasar dan keuangan global, industrialisasi, ketenaga kerjaan, pengendalian militer, demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat global membangun sistem dalam mengelola kepentingan-kepentingan tersebut.

---

<sup>7</sup>Lihat Sennett Richard, *The Culture of the New Capitalisme*, Yale University Press New haven and London, 2006. (Bureaucracy, Talent and the Specter of Uselessness and Consuming Politics)

Persoalan satu dengan yang lain memiliki saling terkait, Amerika mendominasi disebalik pengendalian kekuatan persoalan tersendiri. Invansi berbagai negara kaya minyak seperti di Irak, Libya, Suriah dan negara-negara Timur Tengah lainnya dari penguasaan sebuah rezim menjadi milik perusahaan multi nasional dibawah kendali Amerika. Upaya perebutan kembali oleh gerakan lokal merupakan musuh bersama. Skenario politik diberbagai belahan dunia peran Amerika tak tertandingi, masyarakat lokal kalah dalam publikasi, relasi dan perebutan opini publik yang menentukan. *Class truggles* dalam setiap negara bergeser dari membela rakyat menjadi membela kepentingan nasional, disebalik itu terjadi komitmen-komitmen dengan para pihak terkait. Sulit terungkap, bebarapa kasus di berbagai negara hanya terlihat kebijakan-kebijakan yang disusun rapih sehingga dapat dibenarkan menurut otoritas/prosedur hukum negara itu sendiri walaupun kadangkala melanggar norma hokum itu sendiri. Sejumlah konsep Etika dianggap benar apabila mampu menjadi pembela; mungkin termasuk etika Kristen, etika Konfucius, mungkin termasuk Tunjuk Ajar Melayu.

Konsep *ablaqul karimah* penting dikembangkan, semangat berbagi dan memberi sesungguhnya tak jauh berbeda dengan Etika Kristen yang

dikembangkan Weber dan sebagainya. Kesulitan kita dalam dunia Melayu adalah Islam dalam bahasa Arab, bagi kaum muslim yang banyak belajar tata membaca (tajwid), menghafal al Qur'an, bukan pengamalan lebih utama bahkan tidak mengerti apa yang telah dihafal. Praktek kenegaraan di Indonesia juga terasa persoalan ketika Perda-perda Syariat Islam digulirkan, justeru dengan begitu mudah digugurkan aturan dipandang lebih atas. Struktur hukum meletakan konstitusi diatas segala-galanya, sehingga konsitusi Indonesia terasa beda dengan di Malaysia, Singapore, Brunei, Filipina/Moro dan sebagainya.

Dalam konstitusi Federal Malaysia apabila suatu masyarakat di wilayah tersebut beragama Islam, menggunakan bahasa Melayu, dan hidup dengan adat dan tradisi Melayu maka disebut Melayu atau bertamadun Melayu. Untuk itu dipahami bahwa setiap Tamadun Melayu sesungguhnya adalah Islam, namun tidak semua Islam adalah Tamadun Melayu. Artinya masyarakat di Tanah Melayu menerima Islam secara selektif, sehingga tidak semua model keyakinan dalam Islam dapat hidup di Tanah Melayu. Misal, Syi'ah, ataupun Ahmadiyah Lahore ternyata sampai hari ini sulit di akui di tengah-tengah masyarakat Melayu. Dengan demikian Tamadun Melayu menjadi ideologi primordial Islam sektarian yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

Upaya menegakan Islam secara utuh dan hampair tidak mendapatkan tantangan adalah Brunei Darusalam. Sultan Bolkia telah mengirarkan negara Brunei adalah negara Islam-Melayu-Beraja. Islam sudah menjadi konstitusi negara dan simbol-simbol ke-Islaman dipertahan dalam dalam setiap perayaan hari besar keagamaan, seperti Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri. Walaupun penduduknya tidak sampai 70 % Islam tapi Kerajaan Brunai memiliki akar sejarah khusus dengan Islam sehingga seruan menegakan hukum Islam bagi negara hampir tidak mendapatkan kendala.

## 2. Politisasi

Wali Songo istilah yang paling populer para ulama melakukan syiar Islam pertama di tanah Jawa, sekarang Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tersebar di berbagai wilayah kepulauan nusantara. Setelah kolonial barat terutama Protugis, Spanyol, Inggeris dan paling berkesan adalah Belanda dengan memberi nama Hindia Belanda. Kemenangan Jepang tahun 1942 memaksa Belanda harus angkat kaki, namun kekalahan Jepang oleh Sekutu memaksa Jepang harus meninggalkan Indonesia sebelum memenuhi janjinya untuk menyerahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Bung Karno-Hatta dan kawan-kawan untuk menyampaikan proklamasi dalam pengawalan tentara Jepang

secara tidak langsung. Proklamasi dan Konstitusi UUD 1945 tidak diakui oleh Belanda sehingga terjadi perang Agresi Belanda I dan II 1947 dan 1949 sampai perundingan KMB (Komperensi Meja Bundar) ditanda tangani Indonesia-Belanda.

Peran Islam melepaskan diri dari kolonial sangat besar. Berbagai kelompok masyarakat mengorganisir diri dengan semangat “*jibat fi sabililal*” mengusir Belanda kolonial kafir bergelora di jajahan Hindia Belanda saat itu. Gerakan Islam era kolonial dimulai dari Serikat Islam (SI) tahun 1905 didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta (Jawa Tengah). Pada awalnya SI hanya mengumpulkan kaum pedagang Surakarta agar umat Islam mampu bersaing melawan pedagang Tionghoa yang menjadi anak emas Belanda. Oleh H.O.S. Cokroaminoto selanjutnya diubah menjadi SDI (Serikat Dagang Islam) mulai bergerak ke masalah politik. Partai Politik Islam terbesar awal kemerdekaan adalah Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*), kalau tidak pecah dengan NU (Nahdatul Ulama) hampir mengalahkan PNI (Partai Nasional Indonesia) pimpinan Bung Karno pada saat Pemilu Indonesia Pertama 1955.

Perdebatan paling seru awal kemerdekaan mengenai dasar negara, antara dimasukan atau tidak kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam sila pertama

Pancasila. Kenyataannya sampai sekarang konstitusi UUD 1945 secara tekstual tidak ada menempatkan Islam sebagai dasar negara, namun pasal 29 tentang negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh umat Islam dapat dimaknai dengan Islam, sebagaimana juga halnya oleh agama lain. Pembauran Islam dan budaya di tanah air sangat rumit. Kenyataannya subjektivitas kehidupan masyarakat Indonesia menurut Herbert Feith terbagi dalam 5 kelompok; Nasionalis, Islam, Sosialis, Komunis dan Priyai Jawa.

### 3. Simbolisasi

Tahun 1819 Stamford Raffles mendaratkan armadanya di Singapore dan berunding dengan Sultan Johor dan Tumenggungnya Husein di Singapore untuk mengatur pemerintahan bersama, namun 1824 Raffles berhasil membeli pulau tersebut kepada Sultan dan Tumenggung tersebut. Sejak terjadi transaksi jual beli tersebut Singapore secara keperdataan nyaris menjadi lepas Kesultanan Melayu. 1959 Konstitusi Singapore terbentuk dengan Gubernurnya Sir William Goode dan Lee Kuan Yew. Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahman tahun 1961 mengggagas menjadi negara federal termasuk Singapore dengan alasan kekhawatiran menjadi basis komunis, namun karena Borneo Utara dimasukan salah satu federasi

Malaysia maka terjadi konflik dengan Indonesia. Lee Kuan Yew memanfaatkan situasi tersebut untuk melepaskan Singapore dari Malaysia.

Sekalipun Singapore lepas dari kekuasaan Malaysia masyarakat Melayu Singapore tetap melekat dengan Islam dengan tradisi tarekat. Masjid Ba'alami dikenal sebagai pusat Tareka 'Alawiyah yang dikembangkan pertama kali oleh Muhammad bin 'Ali Ba'alawi. Khas tradisi ini mengamalkan ritual "Ratib Abdul Rahma" setiap malam jumat, masyarakat membawa air dalam botol diletakan di mihrab masjid kemudian dibawa pulang untuk berbagai keperluan, seperti berobat, kelancaran usaha dan sebagainya. Tarekat kedua yang cukup populer sekarang adalah Tareka Qodariah Naqsabandiyah berasal dari Suralaya Tasikmalaya Jawa Barat. Tarekat ini dikembangkan oleh Haji Ali bin Muhammad sebagai wakil dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul'arifin yang tinggal di Tasikmalaya. Selain itu banyak kelompok tarekat yang tersebar di masyarakat danada juga yang dikembangkan oleh muslim asal India.

Untuk membina umat Islam pemerintahan Singapore sejak 1880 telah membentuk Hakim Agama (Qadi) yang didasari Ordonansi Perkawinan Pengikut Muhammad.

Dewan ini 1968 diatur dan terdiri dari beberapa bagian; pengacara umum, tiga orang wakil umat Islam, sekretaris, bendahara dan wakil umat lainnya. Berdasarkan AMLA, 1966 (Akta Petadbiran Hukum Islam) Pemerintah Singapore tahun 1998 membentuk MUIS (Mejlis Ulama Islam Singapore). Anggota MUIS berjumlah 7 orang dan tugas utamanya adalah memberikan saran pendapat kepada Presiden Singapore dari dimensi ke-Islaman. MUIS juga bergerak dibidang pendidikan yaitu MENDAKI (Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim), DANAMIS (Dana Perwalian Muslim bidang ekonomi dan Sosial) JAMIYAH (Humpunan Dakwah Islam Singapore), kemudian ada LSM yang bergerak dibidang pembinaan professional umat AMP (*Association of Muslim Professionals*).

Masyarakat Singapore maju sekalipun tidak banyak terlibat dalam kebijakan pemerintah, di sini Islam menjadi hampa, namun masih menghidupkan simbol-simbol di masyarakat. Ibaratkan padi hampa bukan tidak ada isi, namun tidak utuh,

kalu dilihat kulitnya biasa saja, terlihat berwarna kuning hanya saja kalau dibuka isinya kecil dari kulitnya. Kehampaan tersebut karena nilai-nilai yang dikembangkan penuh dengan kontradiksi-kontradiksi, ketidak konsisten dalam prinsip. Kehampaan hukum, mengingatkan kita pada doktrin dasar hakikat Tauhid. tidak ada satupun yang dapat diandalkan di dunia ini kecuali tergantung kepada Allah semata.

Masyarakat Melayu yang paling memprihatikan adalah Masyarakat Moro di Filipina Selatan. Bangsa Moro tinggal di kepulauan Mindano-Sulu di Filipina Selatan harus berjuang terus demi menegakan hak sebagai sebuah bangsa. Pada awalnya mereka hidup damai harus berhadapan dengan kolonialisasi Spanyol (1876), berlanjut Amerika (1899) dan sejak tahun 1970 sampai karang berhadapan dengan Filipina.

Dari uraian diatas secara sederhana kadar resapan Negara-negara Kawasan Asia Tenggara Terhadap Ke-Islaman dalam membangun Tamadun Melayu dapat digambarkan secara sederhana;

| Muatan Negara | Brunei Darussalam | Malaysia | Indonesia | Singapore | Filipina (Moro) |
|---------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| Konstitusi    | X                 | X        | -         | -         | -               |
| Politisi      | X                 | X        | X         | -         | -               |
| Simbolisasi   | X                 | -        | -         | X         | -               |

### Strategi Penyelamatan Tamadun Melayu dalam Era Globalisasi

Melihat kekuatan dan kelemahan masyarakat Melayu dalam menghadapi kehidupan global saat ini peluang terbesar adalah menyelamatkan tanah leluhur yang mengandung berbagai kekayaan alamiah untuk mempertahankan hidup dan masuk ke pasar global melalui sistem yang disepakati bersama dan saling menguntungkan dalam menjaga eksistensi diri secara bermartabat. Hak Hukum atas norma “*Right The First Time*” dapat terlindungi dalam hukum Internasional. Brunei Darussalam contoh paling sukses, kehidupan politik paling stabil dan ekonomi paling makmur. Memang berhadapan dengan suasana alam demokrasi saat ini cara-cara yang dilakukan Pemerintah Brunei Darussalam mendapatkan kritik dari berbagai pihak, terutama negara-negara barat, apalagi akhir-akhir ini Pemerintah Brunei telah berkomitmen untuk menegakan Hukum Islam secara kaffah dan mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa Internasional. Malaysia juga berhasil melakukan klasifikasi pengaturan penguasaan tanah, dan paling tidak menyelamatkan ruang untuk masyarakat Melayu. Akan terasa beda dengan Indonesia yang melihat Hak Ulayat secara ambigu, konflik tak terselesaikan dengan baik.<sup>8</sup> Kekuatan hukum ditentukan oleh kekuatan kapital sehingga kelompok masyarakat tidak memiliki akses

---

<sup>8</sup>Lihat; Halkis, *Revitalisasi Hak Ulayat Tantang atau Peluang*, Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2006.

tanpaknya terabaikan dari pergaulan nasional dan internasional.<sup>9</sup>

Amir A. Rehman dalam *Gulf Capital Islamic Finance The Rise of the New Global Players* menjelaskan potensi umat Islam dalam menghadapi era global sangat besar. Persoannya hanya terletak dari latar belang umat dengan perkembangan trend dan pihak-pihak berkepentingan.<sup>10</sup> Dalam era pasar global dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dengan tertanam dalam jiwa setiap insan sifat *Ar Rahman* dan *Ar Rahim* pasti dapat membangun ahlak mulia dan mampu berpartisipasi dalam membangun konstelasi peradapan global. Sesungguhnya implementasi tatanan nilai suatu budaya terlihat dalam kreativitas-kreativitas masyarakatnya. Distansi antara tindakan budaya dengan politik terlihat dalam tindakan-tindakan bertujuan. Untuk membaca tindakan tersebut dapat dilihat melalui simbol-simbol, pendekatan-pendekatan dan imajinasi-imajinasi yang dikembangkan.

---

<sup>9</sup>Khusus masyarakat Melayu Riau pada level nasional sangat memprihatinkan karena sejak merdeka 1945 sampai saat ini (1914) hanya dua jadi Menteri, itupun dalam waktu singkat, yaitu Syarwan Hamid kurang dua tahun dan Lukam Edy dua setengah tahun. Sedangkan Gubernur Putera Daerah baru tiga orang, dan paling menyedihkan dua orang sudah mendapatkan putusan hukum terlibat kasus pidana. Melihat keadaan demikian menjadi tanda tanya besar sejauh mana pengakuan keberadaan orang-orang Melayu Riau di mata nasionalisme Indonesia.

<sup>10</sup>Amir A. Rehman, *Gulf Capital Islamic Finance The Rise of the New Global Players*, New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto, 2010, p. 288

Tindakan sebagai wujud pemikiran dan mental suatu masyarakat dalam memahami dirinya (*subjektivitas*) dan yang lain (*others*) dilihat dalam membentuk kedaulatan negaranya. Dengan kedaulatan negara terbentuk cita-cita dapat dicapai, hukum dapat dibangun secara mandiri dan kemerdekaan dapat terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Realitas Sosial paling tidak ada tiga metode pembentukan kedaulatan negara yang telah dilakukan oleh masyarakat di tanah Melayu untuk melepaskan diri dari kolonialisasi. *Pertama*, metode pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda. Metode penyerahan kedaulatan dilakukan Inggris terhadap Malaysia dan Brunei, kemudian metode pemisahan dilakukan Malaysia terhadap Singapore. Model-model ini berlaku dalam hukum internasional<sup>11</sup> sehingga mereka dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan negara-negara lain. Persoalannya dari aspek Ke-Melayu-an tidak hanya berhasil lepas dari masing kolonialisasi,

tapi dengan cara bagaimana masing-masing negara hidup menjadi sebuah *nation state* dengan tetap dalam konteks ke-Melayu-annya. Singapore negara berorientasi pada kepentingan ekonomi, hasilnya negara menjadi maju. Lain halnya dengan Indonesia, persoalan kemajemukan bangsa menjadi persoalan utama sehingga Persatuan Indonesia menjadi prioritas sekalipun dilakukan dengan cara-cara militer, hasilnya negara menjadi paling luas sekalipun dipisah dengan laut. Malaysia membangun konstitusional secara demokrasi, UMNO (*United Malays National Organisation*) menjadi pilar politik Malaysia yang dapat mengawal kedaulatan negara tetap tegak dibawah nuansa ke-Kemelayu-an.

### **Kesimpulan**

Tidak ada teori yang sempurna menjelaskan mengapa demikian kuat penyatuan Islam dengan masyarakat Melayu sehingga Melayu menjadi identik dengan Islam. Kalau dikatakan penyatuan tersebut karena kemampuan para pedagang menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat dapat dibenarkan, namun banyak negara-negara kolonial berhubungan dengan masyarakat melalui bisnis tidak berhasil menyatu demikian. Kalau penyatuan tersebut karena Islam yang berkembang di tanah Melayu melalui jalur spritual/tassauf yang sesuai dengan karakter masyarakat yang bergerak dari animisme menuju masyarakat religius juga dapat dibenarkan namun mengapa ajaran-ajaran spritual

---

<sup>11</sup> Metode Pengakuan tersebut antara lain; *Occupation* (pendudukan), *Prescription* (ada sepanjang efektif), *Accretion* (pertumbuhan dari kecil menjadi besar), *Cession* (penyerahan wilayah/daerah), *Conquest* (penaklukan, perebutan hati). Lihat; Lindley, M. F., LL.D., B.Sc. (Lond.), *The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law Being a Treatise on The Law and Practice Relating to Colonial Expansion The Middle Temple*, Green And Co. Ltd. 39 Paternoster Row, London, E.C. 4, New York, Toronto Bombay, Calcutta And Madras, 1926, pp.123-293. Lihat juga; Brien, John O' *International Law*, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X 9 PX, United Kingdom,, 2001.p.205

lainya tidak demikian menyatu. Yang pasti hubungan Islam dengan masyarakat Melayu muncul dalam membangun peradaban terasa nyata ketika era pasca kolonial memerlukan pemikiran kebangsaan (*nation state*) terbentuk melalui proses politik kenegaraan sehingga kadar resapan negara-negara terhadap nilai-nilai Islam dapat dipahami. Teori yang menjelaskan bahwa negara bangsa adalah produk modernitas tidak sejalan dengan masyarakat kultur yang berorientas pada masa lalu adalah keliru, karena masa sekarang merupakan dunia kehidupan yang berlanjut dalam situasi yang berbeda.

Ada tiga indikator resapan sebuah negara dalam era globalisasi saat ini terhadap Islam, yaitu; 1) konstitusi, mengatur kehidupan administrasi sebuah negara, 2) politisasi sejauh mana Islam menjadi bahasan konsumsi politik kenegaraan, dan 3) simbolisasi menggunakan simbol-simbol ke-Islam dalam menunjukkan identitas kenegaraan.

Islam menyediakan nilai-nilai. akan menjadi *supporter*/pendorong pembangunan *nation state* apabila para ulama mampu melakukan penafsiran dan menebarkan pemahaman menjadi manusia berakhlakul karimah sesuai dengan tuntutan al qur'an dan hadist. Demikian juga sebaliknya, Islam akan menjadi resietensi/musuh bagi suatu negara apabila para ulama memaknai Islam sebagai alat dalam membangun kekuatan politik.

Islam masih relevan bagi masyarakat Melayu sebagai pedoman hidup dalam menghadapi tantang dan memanfaatkan

peluang di era global saat ini kalau memiliki kreativitas dalam mengembangkan nilai nilai Islam secara baru dalam konteks kekinian. Kebebasan yang dituntut dalam era globalisasi menuntut manusia individual beramal soleh, dalam artian tidak hanya rajin ke masjid dan menghafal ayat-ayat al Qu'an diluar kepala tapi buktinya sumbangan apa yang dapat diberikan bagi perkembangan umat manusia.

Islam dapat menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial-politik (muamalah), namun negara-negara poskolonial di Asia Tenggara telah didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik sehingga Islam bergeser dari aqidah ke syariat, akibatnya Islam menjadi resistensi bagi yang lain.

Kebudayaan Melayu memiliki keunikan dalam menanggapi perubahan dan perkembangan lingkungan dan peradaban manusia. Kebesaran Kebudayaan Melayu terlihat dari kemampuan elastisitas dalam menerima sebagai bagain dari peradapan besar kehidupan dunia. Sekalipun dunia perkembangan tersebut tidak berawal dari dunia Melayu, akan tetapi perkembangan tersebut dapat disesuaikan dengan atau diatasnamakan dengan Melayu.

### Daftar Kepustakaan

Aamir A. Rehman, *Gulf Capital Islamic Finance The Rise of the New Global Players*, New York Chicago San

- Francisco Lisbon London Madrid  
Mexico City Milan New Delhi San  
Juan Seoul Singapore Sydney  
Toronto, 2010
- Fee, Lian Kwen, *The Construction of Malay Identity across Nation Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Published by KITLV-Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Vo.157, No.4 (2001)
- Gungwu, Wang (edited), *Nation-Building: five Southeast Asian histories*, ISEAS Publications Institute of Southeast Asian Studies 30 Heng Mui Keng Terrace Pasir Panjang, Singapore 119614, 2005
- Halkis, *Revitalisasi Hak Ulayat Tandang atau Peluang*, Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2006.
- Hill, Michael and Lian Kwen Fee, *The Politics of Nation Building and Citizenship in Singapore*, Rotledge, London New York, 1995
- Rahman, Elmustian, Tien Marni dan Zulkarnaen (editor), *Alam Melayu, Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan*, UNRI Press, Pekanbaru, 2003
- Lindley, M. F., LL.D., B.Sc. (Lond.), *The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law Being a Treatise on The Law and Practice Relating to Colonial Expansion The Middle Temple*, Green And Co. Ltd. 39 Paternoster Row, London, E.C. 4, New York, Toronto Bombay, Calcutta And Madras, 1926
- Sennett Richard, *The Culture of the New Capitalisme*, Yale University Press New haven and London, 2010
- Smith, Antony D, (Terj. Frans Kowa) *Nasionalisme, Teori, Ideologi dan Sejarah*, Erlangga, Jakarta, 2003
- Villa, Charles -Vicencio, *A Theology of Reconstruction Nation-Building And Human Rights*, Cambridge University Press 1992
- Zajda, Joseph, Holger Daun, Lawrence J. Saha (editor.), *Nation-Building, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives*, Springer, 2009